

2026 LAPORAN KINERJA



Triwulan I

PUSAT PENDIDIKAN KP

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat – Nya, sehingga Laporan Kinerja Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2026 ini dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas organisasi yang tertuang melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini mencakup realisasi dan capaian atas target yang ditetapkan pada periode Triwulan I Tahun 2026.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2026 sebesar 119,07 dari lima belas (15) indikator kinerja, dan terindikator istimewa. Dari tiga indikator kinerja yang ditetapkan targetnya pada triwulan I ini, ada dua indikator kinerja yang mencapai persentase capaian 120%, dan ada satu indikator kinerja yang mencapai persentase capaian 116,28%. Capaian kinerja ini merupakan awal yang baik untuk sebagai modal pencapaian kinerja di triwulan selanjutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pendidikan Triwulan I Tahun 2026 ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun sebagai bahan evaluasi kinerja.

Jakarta, 20 April 2026

Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan,



Dr. Alan Frendy Koropitan, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan	3
C. Tugas dan Fungsi	4
D. Keragaan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan KP	8
E. Sistematika Laporan Kinerja.....	10
F. Potensi dan Permasalahn.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	14
B. Rencana Kerja Tahun 2026.....	16
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026	16
D. Pengukuran Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2026	20
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Utama	22
C. Akuntabilitas Keuangan	38
D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Pusat Pendidikan KP	39
BAB IV PENUTUP	
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	41
B. Permasalahan dan Rekomendasi	42
LAMPIRAN	
Link Bukti Dukung Capaian Pusat Pendidikan KP	
Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2026	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Uraian Fungsi Tim Kerja Pusat Pendidikan KP.....	5
Tabel 1.2	Rincian Pegawai Pusat Pendidikan KP per Maret 2026.....	8
Tabel 1.3	Rincian Pegawai UPT Pendidikan KP	9
Tabel 2.1	Rencana Kerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2026	16
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2026	16
Tabel 3.1	Target dan Capaian Kinerja Tahun Triwulan I Tahun 2026 Pusat Pendidikan KP	22
Tabel 3.2	IKU 1 : Persentase Lulusan Pendidikan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	24
Tabel 3.3	Sebaran serapan lulusan di Satuan Pendidikan KP per Triwulan I Tahun 2026	25
Tabel 3.4	Jumlah peserta didik di satuan pendidikan KP per Triwulan I Tahun 2026	26
Tabel 3.5	Capaian IK 11 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%)	33
Tabel 3.6	IK Tabel Perbandingan Capaian Kinerja pada Level Unit Kerja Lingkup BPPSDM KP	34
Tabel 3.7	Capaian IK 15 : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)	37
Tabel 3.8	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja pada Level Unit Kerja Lingkup BPPSDM KP	37
Tabel 3.9	Tabel Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Pusat Pendidikan KP	38
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan per 31 Maret 2026	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Hasil capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2026 pada tampilan web:kinerjaku.kkp.go.id	vii
Gambar 1.1	Susunan Keanggotaan Tim Kerja Lingkup Pusat Pendidikan KP Tahun 2026	5
Gambar 1.2	Sebaran UPT Pendidikan KP	9
Gambar 1.3	Sebaran Pegawai UPT Pendidikan KP	9
Gambar 3.1	Gambar Capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2026	20
Gambar 3.2	Capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2026 pada tampilan web:kinerjaku.kkp.go.id	21
Gambar 4.1	Hasil Capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2026 pada tampilan web:kinerjaku.kkp.go.id	41

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pendidikan KP mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 10 Februari 2025. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pusat Pendidikan KP menyelenggarakan fungsi :

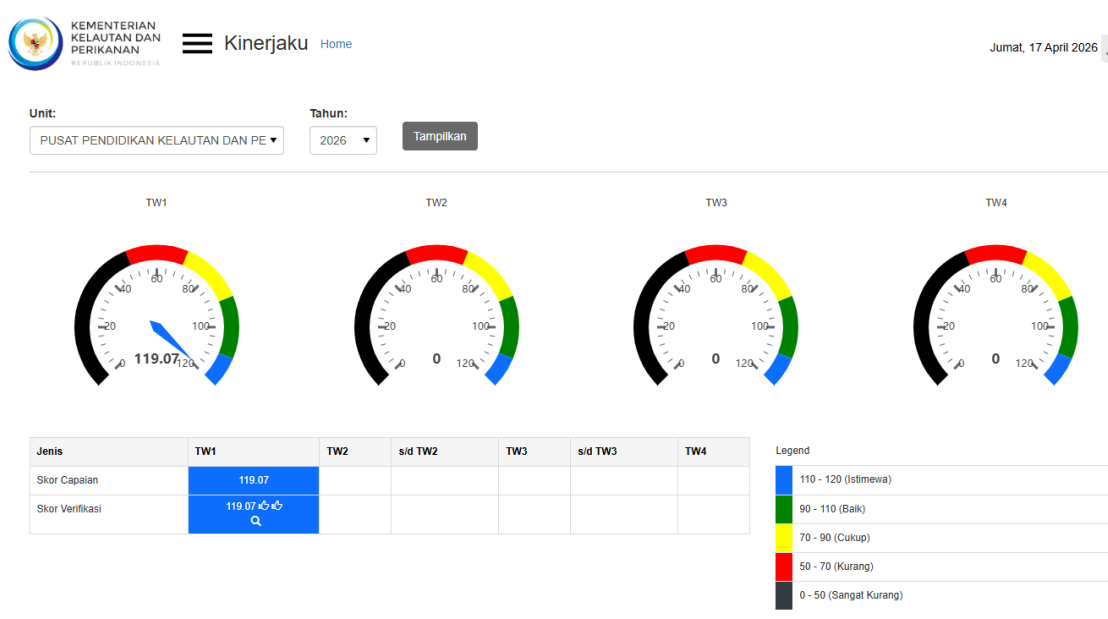
- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan tata kelola penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan tugas belajar dan tugas belajar mandiri pegawai negeri sipil Kementerian;
- e. pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pengelolaan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- g. koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pendidikan KP.

Susunan organisasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas: (a) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan; dan (b) jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2026 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagai pijakan utama arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian ekosistem laut, yang diwujudkan melalui 5 (lima) arah kebijakan, yaitu : (1) Memperluas kawasan konservasi laut; (2) Penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota; (3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. Pusat Pendidikan KP dan Satuan Pendidikan KP berkontribusi dalam kebijakan pembangunan kelautan dan

perikanan tersebut melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan, utamanya di bidang pendidikan kelautan dan perikanan.

Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2026 telah ditetapkan pada 5 Januari 2026, yang terdiri dari 3 Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja. Laporan Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2026 berisikan tentang capaian atas target yang telah ditetapkan di Triwulan I Tahun 2026. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja (*Key Performance Indicator*, disingkat KPI), dengan bantuan perangkat lunak melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja Pusdik KP Triwulan I Tahun 2026 sebesar 119.07%



Gambar I Hasil capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP pada tampilan web : kinerjaku.kkp.go.id

Periode Triwulan I Tahun 2026, terdapat 3 indikator kinerja yang sudah terealisasi, antara lain :

1. IK Persentase Lulusan Pendidikan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%), dengan target tahunan adalah 86%, target triwulan I adalah 5%, dan capaian sebesar 7,23%, dengan persentase capaian adalah 120%;
2. IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 86%, target triwulan I adalah 86%, dan capaian sebesar 100%, dengan persentase capaian adalah 116,28%;

3. IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 77%, target triwulan I adalah 77%, dan capaian sebesar 100%, dengan persentase capaian adalah 120%;

Secara umum, kinerja Pusat Pendidikan KP pada triwulan I baik, namun hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kinerja adalah Indikator Kinerja yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan, agar target akhir tahun dapat dicapai dengan baik.

BAB I

- ◆ Latar Belakang
- ◆ Tujuan
- ◆ Tugas dan Fungsi
- ◆ Potensi dan Permasalahan
- ◆ Keragaman SDM
- ◆ Sistematis Laporan Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – Undang No 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2026-2045 mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2026 – 2029, menjabarkan **Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi ini dicapai melalui **Delapan Misi Presiden** yang dituangkan dalam **Delapan Asta Cita**, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2026 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagai pijakan utama arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian ekosistem laut, yang diwujudkan melalui 5 (lima) arah kebijakan, yaitu :

- (1) Memperluas kawasan konservasi laut;
- (2) Penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota;
- (3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
- (4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- (5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Pusat Pendidikan KP dan Satuan Pendidikan KP berkontribusi dalam kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan, utamanya di bidang pendidikan kelautan dan perikanan.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan 3 poin, dimana BPPSDM KP, khususnya Pusdik berkontribusi pada poin ke 3 yaitu **peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan** melalui pendidikan vokasi yang didukung secara aktif oleh 10 Politeknik KP, 1 Akademi Komunitas, dan 5 Sekolah Usaha Perikanan Menengah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia

Program dan Kegiatan Pusat Pendidikan KP Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja KKP Tahun 2026, Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Pusat Pendidikan KP Tahun 2026, dan Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2026

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2026 bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2026;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusat Pendidikan KP untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Tugas dan Fungsi

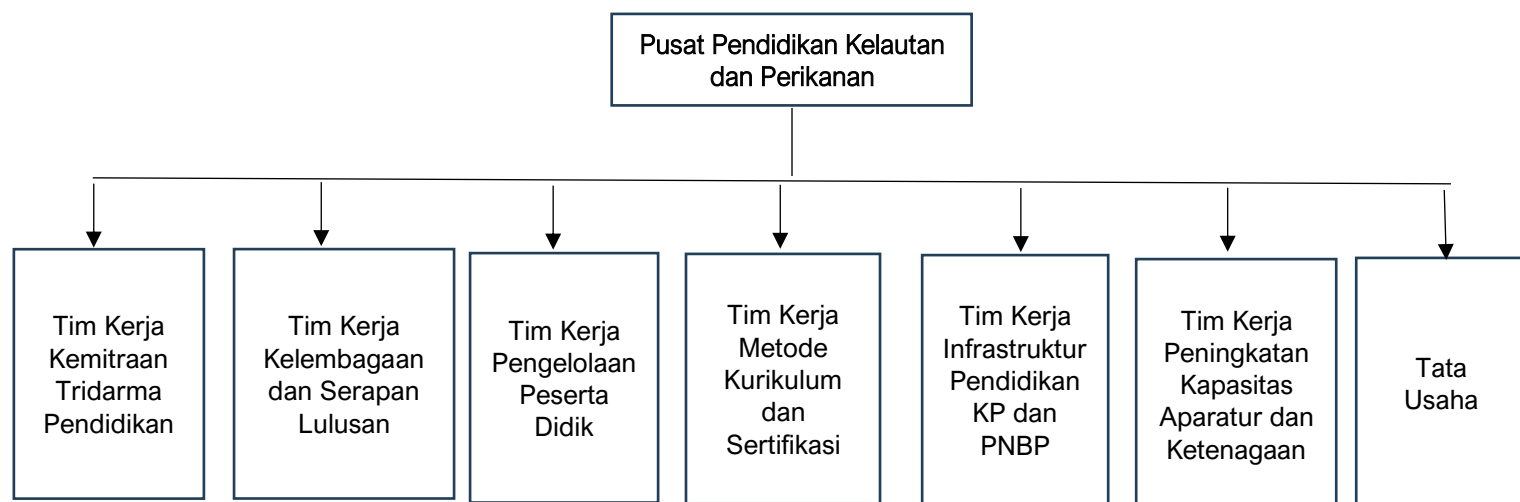
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan berada di bawah unit eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP (BPPSDM KP).

Pusat Pendidikan KP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Pusat Pendidikan KP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan tata kelola penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan tugas belajar dan tugas belajar mandiri pegawai negeri sipil Kementerian;
- e. pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pengelolaan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- g. koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pendidikan KP.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Pusat Pendidikan KP berpedoman pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan Surat Tugas Nomor: B.586/BPPSDM.3/KP.440/IV/2025 tanggal 2 April 2026 tentang Susunan Keanggotaan Tim Kerja Lingkup Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut :

Gambar 1.1. Susunan Keanggotaan Tim Kerja Lingkup Pusat Pendidikan KP Tahun 2026



Adapun uraian fungsi dari masing – masing tim kerja (timja) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Uraian Fungsi Tim Kerja Pusat Pendidikan KP

No	Tim Kerja	Uraian Fungsi
1	Tim Kerja Kemitraan Tridarma Pendidikan	a. Membangun dan memelihara hubungan dengan lembaga pendidikan, industri, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan program pendidikan b. Mengidentifikasi peluang kerjasama baru yang dapat mendukung pengembangan penyelenggaraan pendidikan c. Berkontribusi dalam penyusunan kebijakan teknis dan rencana strategis terkait pendidikan kelautan dan perikanan. d. Mengembangkan pedoman operasional untuk implementasi program kerjasama. e. Mengorganisir kegiatan pendidikan vokasi yang melibatkan kolaborasi dengan mitra eksternal, seperti pelatihan, seminar, dan workshop. f. Memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman antara institusi pendidikan kelautan dan perikanan. g. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program kerjasama untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. h. Menyusun laporan evaluasi untuk menilai efektivitas kerjasamaserta memberikan rekomendasi perbaikan i. Mengidentifikasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat j. Menyusun bahan pimpinan terkait bentuk inovasi atau teknologi terapan yang dihasilkan Satuan Pendidikan k. Melakukan pembinaan dan pendampingan terkait pencapaian target kinerja dari penelitian dan pengabdian masyarakat pada Satuan Pendidikan l. Merencanakan kegiatan dan anggaran serta menyusun data kegiatan tim kerja

No	Tim Kerja	Uraian Fungsi
		Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja
2	Tim Kerja Kelembagaan dan Serapan Lulusan	Koordinasi, perencanaan, pengelolaan dan pemantauan alumni dan serapan lulusan Pendidikan KP a. Koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan penjaminan mutu Pendidikan Menengah KP b. Koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi KP c. Koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan Transformasi Kelembagaan Pendidikan KP Merencanakan kegiatan dan anggaran serta menyusun data kegiatan tim Kerja. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja
3	Tim Kerja Pengelolaan Peserta Didik	a. Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dan koordinasi pemberian bantuan biaya pendidikan b. Koordinasi pembinaan peserta didik c. Pemantauan data peserta didik dan memfasilitasi sidang Do/Tunda dengan dewan akademik d. Penyusunan pedoman terkait dengan kegiatan seperti pedoman penerimaan peserta didik baru, pedoman ijazah, penyusunan peraturan pembebasan biaya pendidikan. e. Mendukung kegiatan pelantikan dan wisuda Merencanakan kegiatan dan anggaran serta menyusun data, pemantauan dan evaluasi kegiatan tim Kerja Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja
4	Tim Kerja Metode Kurikulum dan Sertifikasi	a. Perencanaan dan pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan b. Pengelolaan pembelajaran di Satuan Pendidikan KP c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran secara berkala d. Merencanakan kegiatan dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan tim kerja e. Menginisiasi dan melaksanakan kerjasama pengembangan kurikulum f. Koordinasi dalam pelaksanaan sertifikasi peserta didik di Satuan Pendidikan KP g. Melakukan pendataan sertifikasi peserta didik di Satuan Pendidikan KP h. Melakukan monitoring sertifikasi peserta didik di Satuan Pendidikan KP i. Melakukan dukungan terhadap program prioritas Presiden, KKP, dan BPPSDMKP Merencanakan kegiatan dan anggaran serta menyusun data kegiatan tim Kerja Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja
5	Tim Kerja Infrastruktur Pendidikan KP dan PNBP	a. melakukan koordinasi penetapan sumber penerimaan fungsional dan umum PNBP satuan kerja pendidikan tinggi dan menengah serta pemantauan realisasi penerimaan;

No	Tim Kerja	Uraian Fungsi
		b. melakukan koordinasi penetapan dan persetujuan maksimal pencairan (MP) PNBP satuan kerja pendidikan tinggi dan menengah serta pemantauan realisasi pemanfaatan; c. menyusun laporan capaian kinerja bulanan, semester, dan tahunan tim kerja sarana prasarana pendidikan dan PNBP; d. melaksanakan urusan administrasi atau pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran tim kerja sarana prasarana pendidikan dan PNBP lingkup Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan; e. melaksanakan koordinasi dan pemantauan secara berkala serta evaluasi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan terhadap peningkatan kompetensi peserta didik, optimalisasi Teaching Factory (TEFA), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); f. menyusun draf revisi/pedoman/standar terkait sarana prasarana pendidikan kelautan dan perikanan
		g. melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan klasifikasi ruang administrasi, pembelajaran, hunian, penunjang, dan pembinaan karakter; h. melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan bidang atau program studi pada pendidikan tinggi dan bidang atau program keahlian pada pendidikan menengah. i. mengelola data dan kondisi eksisting sarana dan prasarana pendidikan tinggi dan menengah; j. menyusun perencanaan kebutuhan dan pengembangan atas dasar usulan satuan pendidikan dan kesenjangan kebutuhan sesuai klasifikasi/ bidang/ program studi/ program keahlian dan kebutuhan standar kompetensi dan standar dunia kerja; k. melaksanakan koordinasi dan pemantauan rencana kebutuhan dan pengembangan, kesesuaian jenis, kualitas, dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan; Merencanakan kegiatan dan anggaran serta menyusun data kegiatan tim Kerja Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja
6	Tim Kerja Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Ketenagaan	a. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Tes TPA dan TOEFL, seleksi penerima beasiswa, pembayaran beasiswa, layanan tugas belajar dibiayai, telaah penyelenggaraan tugas belajar dibiayai, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas belajar dibiayai; b. Melaksanakan koordinasi dan verifikasi usulan rekomendasi serta menyusun rekomendasi tugas belajar dibiayai, baik dalam negeri maupun luar negeri,

No	Tim Kerja	Uraian Fungsi
		serta melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rekomendasi tugas belajar dibiayai; c. Melaksanakan koordinasi, verifikasi, dan penyusunan rekomendasi tugas belajar mandiri, memberikan layanan tugas belajar mandiri, serta melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas belajar mandiri;
		Melaksanakan evaluasi beban kerja pendidik, pemutakhiran data pendidik dan tenaga kependidikan, analisis kompetensi, pemetaan serta pemenuhan kebutuhan pendidik, penyusunan rekomendasi mutasi, pengusulan izin ke luar negeri, serta persiapan pemberian penghargaan bagi guru dan dosen berprestasi.
		Merencanakan kegiatan dan anggaran serta menyusun data kegiatan tim Kerja
		Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Pusat Pendidikan KP / Ketua Tim Kerja
7	Tata Usaha	a. Koordinasi dan penyelesaian hasil pengawasan b. Pengelolaan dan Implementasi BMN
		a. Koordinasi, layanan dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan dan anggaran pendidikan kelautan dan perikanan b. Koordinasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran pendidikan kelautan dan perikanan c. Koordinasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan dan anggaran pendidikan kelautan dan perikanan c. Koordinasi, penyiapan bahan dan layanan kepegawaian dan kinerja organisasi Pusat Pendidikan KP
		Koordinasi dan layanan informasi kegiatan peningkatan kualitas profesi ASN Lingkup Pusat Pendidikan KP
		Fasilitasi dan pengelolaan layanan kearsipan dan persuratan Pusat Pendidikan KP
		Koordinasi, penyiapan bahan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

D. Keragaan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan KP

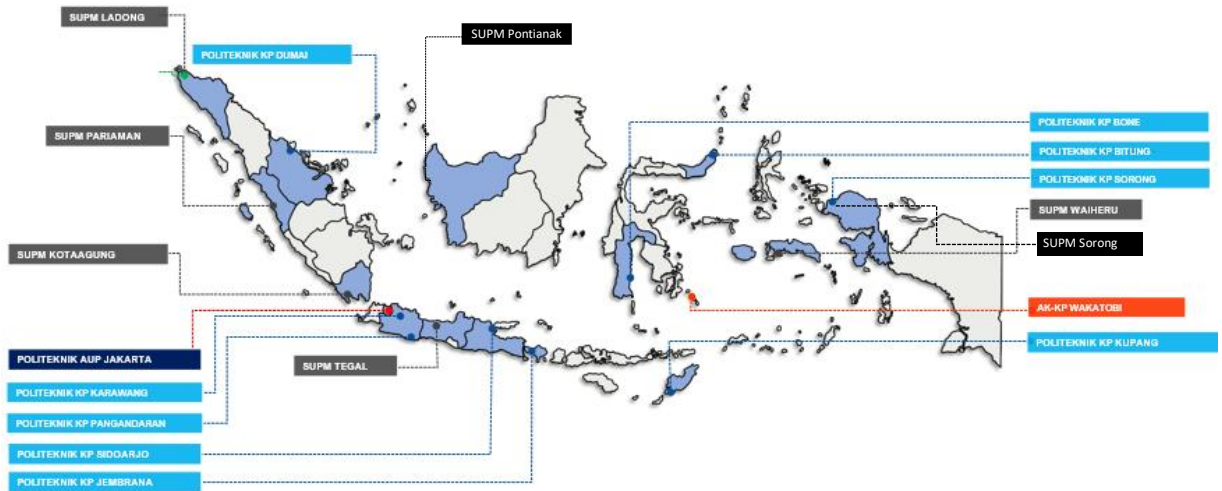
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Pendidikan KP dibantu oleh 18 Satuan Pendidikan, dengan rincian 10 Politeknik, 1 Akademi Komunitas, dan 9 SUPM. Jumlah pegawai Pusat Pendidikan KP sebanyak 64 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2. Rincian Pegawai Pusat Pendidikan KP per Maret 2026

No	Status Kepegawaian	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	CPNS dan PNS	31	20	51
2	PPPK	6	4	2
3	PJLP	2	1	3
JUMLAH		40	25	64

Berikut sebaran UPT Pendidikan KP sebanyak 18 unit kerja sebagaimana berikut :

Gambar 1.2 Sebaran UPT Pendidikan KP

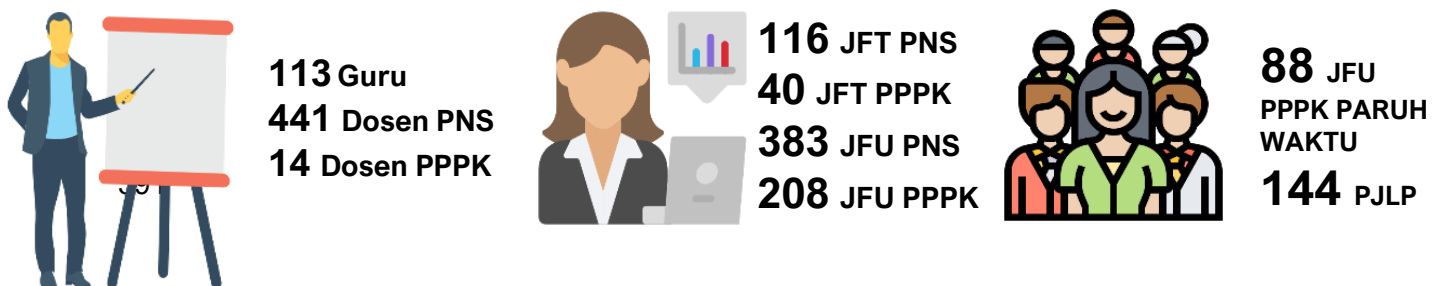


Sementara, rincian pegawai UPT Pendidikan KP per Triwulan I 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3. Rincian Pegawai UPT Pendidikan KP

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Dosen	283	172	455
2	Tenaga Kependidikan (PT)	467	201	668
3	Guru	77	36	113
4	Tenaga Kependidikan (PM)	244	83	327

Gambar 1.3 Sebaran Pegawai UPT Pendidikan KP



E. Sistematika Laporan Kinerja

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Pusat Pendidikan KP adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan I Tahun 2026.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Pusat Pendidikan KP seperti tugas dan fungsi serta struktur organisasi Pusat Pendidikan KP.

3. **Bab II Penetapan Perjanjian Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Kerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2026 serta Pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja selama Triwulan I Tahun 2026 dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Permasalahan dan Rekomendasi.
6. **Lampiran**

F. Potensi dan Permasalahan

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan memiliki 18 Satuan Pendidikan, yang terdiri atas 10 (sepuluh) Politeknik KP, 7 (Tujuh) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan 1 (satu) Akademi Komunitas, dengan pendidik berjumlah 568 orang terdiri atas 113 guru, 441 dosen, dan 14 dosen P3K, dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan *teaching factory* dengan 80% praktek dan 20% teori. Satuan Pendidikan Tinggi yang berada di bawah pembinaan Pusdik KP merupakan pendidikan vokasi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, mencakup program pendidikan Diploma I (D1), Diploma III (D3) dan Diploma IV (D4) serta pascasarjana terapan dengan **program studi unggulan** meliputi Agribisnis KP, Budidaya Air Payau, Kapal Perikanan, Penangkapan Ikan, Pengolahan Ikan, Perikanan Air Payau, Budidaya Laut, Kelautan, dan Ekowisata Bahari serta Konservasi. Satuan Pendidikan Menengah memiliki **program keahlian unggulan** Nautika Penangkapan Ikan, Budidaya Air Tawar, Budidaya Air Payau, Budidaya Laut, dan Pengolahan Perikanan. Lulusan pendidikan pada Satuan Pendidikan KP telah dilengkapi dengan sertifikasi berbagai bidang keahlian.

Namun, dibalik potensi Pusat Pendidikan KP, **ada permasalahan dan tantangan** yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

1. Ketidakteragaman status dan akreditasi satuan pendidikan, tata kelola yang belum optimal, serta tumpang tindih regulasi antar jenjang.
2. Sarana dan prasarana pendidikan, baik tinggi maupun menengah, belum sepenuhnya memadai serta masih berbasis kewilayahan, bukan kepakaran.
3. Kapasitas tenaga pendidik juga masih terbatas; sebagian dosen dan guru belum

memiliki sertifikasi atau keahlian spesifik yang sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Akibatnya, keselarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri belum optimal, sehingga belum maksimalnya serapan lulusan di tingkat nasional maupun internasional.

4. Minat anak pelaku utama untuk melanjutkan pendidikan di bidang kelautan dan perikanan masih rendah, dipengaruhi oleh persepsi terbatas terhadap peluang kerja dan kondisi sosial ekonomi keluarga.
5. Kemitraan dengan dunia usaha dan industri juga belum merata, sehingga pembelajaran berbasis praktik dan link-and-match masih perlu diperkuat.

BAB II

- ◆ Rencana Strategis
- ◆ Rencana Kinerja Tahun 2026
- ◆ Perjanjian Kinerja Tahun 2026
- ◆ Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

BPPSDM KP telah Menyusun Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029 yang tertuang dalam Peraturan Kepala BPPSDM KP Nomor 25 Tahun 2025. Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra BPPSDM adalah dokumen perencanaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Renstra BPPSDM merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Badan dalam penyusunan program kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Sektor kelautan dan perikanan memegang peran strategis dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029, “ Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional. Peran tersebut tercermin pada sasaran Pembangunan RPJMN 2025–2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%, penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tata Kelola sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, inovatif, dan berbasis kesejahteraan diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus penguat daya saing bangsa.

BPPSDM KP berperan sentral dalam penyiapan SDM yang menjadi kunci keberhasilan kebijakan *Blue Economy* KKP yaitu : (1) Memperluas kawasan konservasi laut; (2) Penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota; (3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. Pusat Pendidikan KP menyiapkan SDM melalui pendidikan vokasi untuk mendukung keberhasilan kebijakan BE KKP melalui 16 satuan pendidikan KP yang terdiri dari 11 perguruan tinggi dan 5 satuan pendidikan menengah KP sebagai basis pengembangan pendidikan vokasi KP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
2. penyusunan tata kelola penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
3. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
4. pelaksanaan penyelenggaraan tugas belajar dan tugas belajar mandiri pegawai negeri sipil Kementerian;
5. pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
6. pelaksanaan pengelolaan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
7. koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan; dan
9. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Tujuan Pusat Pendidikan KP yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KKP dalam rangka mencapai Sasaran Strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2025 – 2029 adalah:

1. Menghasilkan SDM berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan.
2. Memperluas akses pendidikan dengan berbasis digital/teknologi (*e-learning*) bagi anak pelaku utama pada satuan pendidikan kelautan dan perikanan.
3. Menjadikan Satuan Pendidikan KP sebagai pusat rujukan (*center of excellence*) oleh Satuan Pendidikan di Indonesia.
4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial SDM secara efektif dan efisien.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pusat Pendidikan KP.

Sasaran Kegiatan yang akan dicapai Pusat Pendidikan KP pada Tahun 2026 berdasarkan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan KP yang mendukung Visi dan Misi KKP, yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

1. SK1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
2. SK2 Aparatur KKP yang Dididik dan Dilatih
3. SK3 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

B. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Rencana Kerja (RK) memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan, untuk nantinya menjadi dasar penyusunan target pada indikator kinerja utama di PK Pusat Pendidikan KP dan cascading ke Satuan Pendidikan KP Tahun 2026. Berikut adalah Renja Pusat Pendidikan KP berdasarkan DIPA Awal Tahun 2026:

Tabel 2.1 Rencana Kerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Target 2026	Alokasi Anggaran
1	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	5.837 orang	Rp.172.821.807.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	19 Layanan	Rp.267.203.269.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KKP	224 orang	Rp.9.000.000.000
TOTAL			Rp.449.025.076.000

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BPPSDM harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran kegiatan Pusat Pendidikan KP yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2026

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditandatangani 5 Januari 2025 oleh Kepala Pusat Pendidikan KP dan Kepala BPPSDM KP :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Persentase Lulusan Pendidikan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	86
		2	Persentase peserta didik yang lulus pada satuan pendidikan KP (%)	85
		3	Tingkat Optimalisasi Unit Produksi terhadap Penerimaan Fungsional PNBK (%)	50
		4	Efektivitas Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Kelautan dan Perikanan (%)	60
		5	Persentase Standar Kompetensi Lulusan di Satuan Pendidikan KP (%)	90

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		6	Persentase Pendidik yang Memenuhi Beban Kerja Pendidik (%)	80
		7	Persentase Program Studi dan Perguruan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi (%)	80
		9	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	80
		8	Teknologi yang Diterapkan (Teknologi)	11
2	Aparatur yang Dididik dan Dilatih	10	Persentase Usulan Tugas Belajar yang Direkomendasikan (%)	70
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Pendidikan KP (%)	86
		12	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai)	82
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (Indeks)	87
		14	Nilai Pengawasan Kearsiapan Internal Pusat Pendidikan KP	71
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)	77

D. Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2026, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) kinerja dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing indikator.

Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IK adalah sebagai berikut:



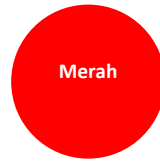
Istimewa
110 - 120



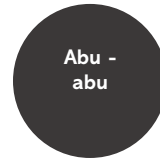
Baik
90 - <110



Cukup
70 - < 90



Kurang
50 - < 70



Sangat Kurang
Skor < 50

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup Pusat Pendidikan KP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

BAB III

- ◆ Prestasi Indikator Kerja Triwulan I 2026
- ◆ Evaluasi dan Analisis Kinerja
- ◆ Akuntabilitas Keuangan
- ◆ Efisiensi Anggaran

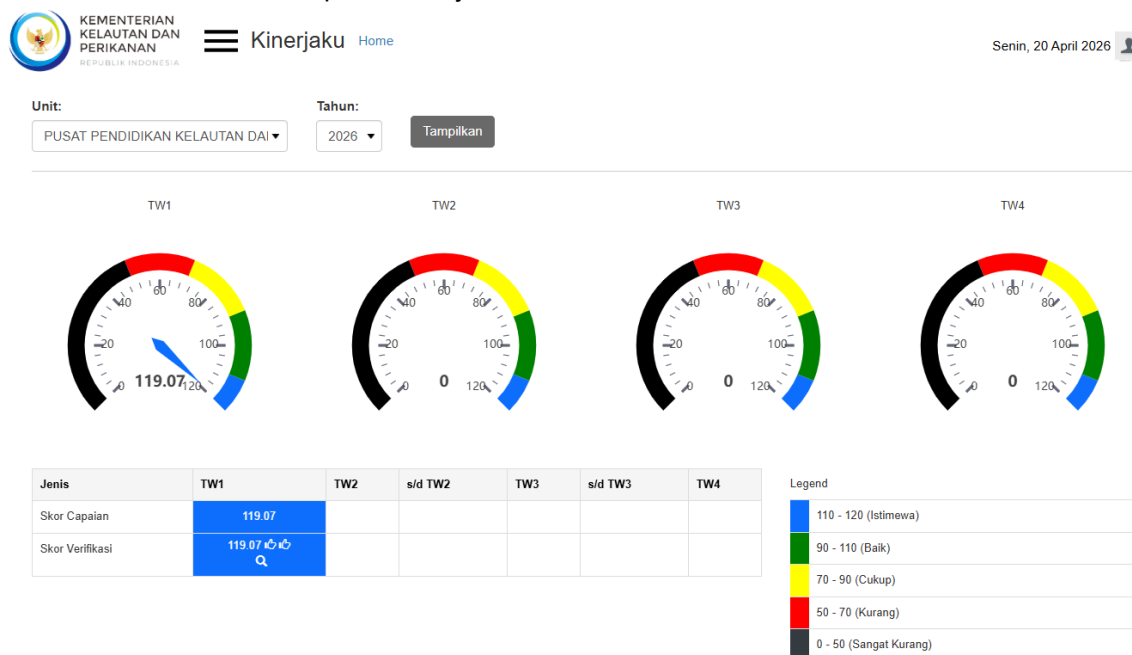
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak, yaitu melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja Pusat Pendidikan KP di Triwulan I Tahun 2026 sebesar 119,07%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:

Gambar 3.1. Gambar Capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2026



sumber : kinerjaku.kkp.go.id

Sesuai dengan Rincian Target IKU, maka target kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 hanya 3 IK. Detail capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada gambar tangkapan layar dari aplikasi kinerjaku sebagai berikut :

Gambar 3.2. Capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2026 pada web kinerjaku.kkp.go.id



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA


e-Kinerja
[Home](#)

Senin, 20 April 2026


NKO Maret - 2026

Download

Unit Kerja : PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Skor Kinerja : 119.07

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol 
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input
SK.01	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten						120,00			120,00		
IKSK.01.01	Persentase Lulusan Pendidikan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%) Tambah Data Dukung+ Data Dukung1 	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	5,00	7,23	120,00	5,00	7,23	120,00	15-Apr-2026 16:18
IKSK.01.02	Persentase peserta didik yang lulus pada satuan pendidikan KP (%) Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2026 16:18
IKSK.01.03	Tingkat Optimalisasi Unit Produksi terhadap Penerimaan Fungsional PNBPN (%) Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	50,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2026 16:18
IKSK.01.04	Efektivitas Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Kelautan dan Perikanan (%) Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	60,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2026 16:18
IKSK.01.05	Persentase Standar Kompetensi Lulusan di Satuan Pendidikan KP (%) Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	90,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2026 16:18
IKSK.01.06	Persentase Pendidik yang Memenuhi Beban Kerja Pendidik (%) Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2026 16:18
IKSK.01.07	Persentase Program Studi dan Perguruan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi (%) Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2026 16:18
IKSK.01.08	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang DitingkatkanKapasitasnya (%) Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2026 16:18
IKSK.01.09	Teknologi yang Diterapkan (Teknologi) Tambah Data Dukung+	Teknologi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	11,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2026 16:18
SK.02	Aparatur KKP yang Dididik dan Dilatih											
IKSK.02.01	Persentase Usulan Tugas Belajar yang Direkomendasikan (%) Tambah Data Dukung+	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2026 16:18
SK.03	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						118,14			118,14		
IKSK.03.01	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untukPerbaikan Kinerja Pusat Pendidikan (%) Tambah Data Dukung+ Data Dukung1 	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	86,00	100,00	116,28	86,00	100,00	116,28	15-Apr-2026 16:18
IKSK.03.02	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2026 16:18

NKO Maret - 2026

Download

Unit Kerja : PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Skor Kinerja : 119.07

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input
SK.03	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						118,14			118,14		
IKSK.03.03	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2026 16:18
	Tambah Data Dukung											
IKSK.03.04	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Pendidikan KP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2026 16:18
	Tambah Data Dukung											
IKSK.03.05	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,00	77,00	100,00	120,00	77,00	100,00	120,00	15-Apr-2026 16:18
	Tambah Data Dukung Data Dukung1											

Tutup

sumber : kinerjaku.kkp.go.id

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Utama

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPSDM KP.

Penjabaran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Target dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Pusat Pendidikan KP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW I	CAPAAN TW I	PERSENTASE CAPAIAN
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Persentase Lulusan Pendidikan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	5	7,23	120,00
		2	Persentase peserta didik yang lulus pada satuan pendidikan KP (%)	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW I	CAPAIAN TW I	PERSENTASE CAPAIAN
		3	Tingkat Optimalisasi Unit Produksi terhadap Penerimaan Fungsional PNBPN (%)	-	-	-
		4	Efektivitas Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Kelautan dan Perikanan (%)	-	-	-
		5	Persentase Standar Kompetensi Lulusan di Satuan Pendidikan KP (%)	-	-	-
		6	Persentase Pendidik yang Memenuhi Beban Kerja Pendidik (%)	-	-	-
		7	Persentase Program Studi dan Perguruan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi (%)	-	-	-
		9	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	-	-	-
		8	Teknologi yang Diterapkan (Teknologi) (IKU)	-	-	-
2	Aparatur yang Dididik dan Dilatih	10	Persentase Usulan Tugas Belajar yang Direkomendasikan (%)	-	-	-
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Pendidikan KP (%)	86	100	116,28
		12	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai)	-	-	-
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (Indeks)	-	-	-
		14	Nilai Pengawasan Kearsiapan Internal Pusat Pendidikan KP	-	-	-
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)	77	100	120,00

sumber : kinerjaku.kkp.go.id

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Utama 1

Persentase Lulusan Pendidikan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)

Indikator Persentase Lulusan Pendidikan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja merupakan instrumen strategis untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam mendukung kebutuhan

pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Indikator ini tidak hanya merefleksikan output pendidikan, tetapi juga outcome dan manfaat nyata (impact) bagi dunia kerja dan masyarakat. Tingkat serapan yang tinggi menunjukkan bahwa kurikulum, kompetensi lulusan, serta proses pembelajaran telah selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi sektor KP. Sebaliknya, tingkat serapan yang rendah menjadi sinyal perlunya penyesuaian kurikulum, metode pembelajaran, maupun penguatan kerja sama dengan industri. IKU ini bisa menjadi alat evaluasi kinerja, akuntabilitas publik, peningkatan mutu pendidikan, serta dasar pengambilan kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan sektor kelautan dan perikanan

Indikator ini mengukur sejauh mana lulusan Pendidikan KP tahun 2025 mampu mendapatkan pekerjaan dengan melampirkan data *by name by address* lulusan satuan pendidikan dilengkapi dengan bukti dukung surat keterangan bekerja/surat penerimaan/pemanggilan kerja/ kartu pegawai/ perjanjian kerja (kontrak kerja)/surat keterangan persiapan kerja (pelatihan kerja)/foto kegiatan dengan tagging/Nomor Induk Berusaha (NIB)/surat izin tempat usaha/surat izin usaha mikro kecil (IUMK)/surat keterangan pelaku usaha/foto kegiatan dan produk penjualan dengan tagging/media penjualan atau surat izin usaha lainnya yang disahkan K/L terkait.

Tabel 3.2 IKU 1 : Persentase Lulusan Pendidikan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten									
IK 1 : Persentase Lulusan Pendidikan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)									
Realisasi				2026				Renstra BPPSDM KP Tahun 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Capaian	% Capaian	% Kenaikan Capaian 2025 – 2026	Target 2029	% Capaian terhadap target 2029
-	-	-	-	5	7,23	120,00	-	89	8,12

Periode pengukuran IKU ini adalah triwulanan, dengan target tahunan adalah 86%, target triwulan I adalah 5%, dan berdasarkan Nota Dinas Nomor 526/BPPSDM.3/RC.610/IV/2026 tanggal 15 April 2026 perihal Penyampaian Data Dukung Indikator Kinerja Persentase Lulusan Pendidikan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%) capaian triwulan I adalah 7,23%, atau 180 orang dari lulusan tahun 2025 sebanyak 2.489 orang, atau persentase capaian adalah 120,00%. Tabel berikut menggambarkan sebaran capaian di satuan pendidikan KP :

Tabel 3.3 Sebaran serapan lulusan di Satuan Pendidikan KP per Triwulan I Tahun 2026

No	Satuan Pendidikan	Lulusan yang Terserap DUDIKA
1	Politeknik AUP	30
2	Politeknik KP Sidoarjo	12
3	Politeknik KP Bitung	16
4	Politeknik KP Sorong	12
5	Politeknik KP Karawang	7
6	Politeknik KP Kupang	12
7	Politeknik KP Bone	20
8	Politeknik KP Dumai	8
9	Politeknik KP Pangandaran	6
10	Politeknik KP Jembrana	18
11	AK KP Wakatobi	3
12	SUPM Ladong	5
13	SUPM Pariaman	10
14	SUPM Kotaagung	5
15	SUPM Tegal	8
16	SUPM Waiheru	8
Jumlah Serapan (Orang)		180
Lulusan 2025 (Orang)		2.489
Capaian TW I (%)		7,23

IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian periode Triwulan I Tahun 2025, selain karena di tahun 2025 belum ada capaian pada triwulan I, metode perhitungan yang dipakai pun berbeda, dimana pada tahun 2025 triwulan I masih menghitung lulusan tahun berjalan. Jika dibandingkan dengan target 2029 yang tertuang dalam Renstra BPPSDM KP Tahun 2025 - 2029 sebesar 89%, persentase capaian adalah 8,12%. Dari 180 orang serapan lulusan, tercatat 119 orang berjenis kelamin laki – laki, dan 61 orang berjenis kelamin perempuan.

Faktor keberhasilan pencapaian IKU ini adalah :

1. Melakukan kerjasama dengan pihak DUDIKA, sehingga membuka akses magang, rekrutmen langsung, dan penempatan kerja bagi lulusan
2. Satuan pendidikan KP dan Pusat Pendidikan KP aktif melakukan penelusuran lulusan dan pendampingan kepada lulusan agar bisa segera bekerja

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk pencapaian IKU ini antara lain :

1. Verifikasi serapan lulusan di satuan pendidikan KP oleh Pusat Pendidikan KP. Hal ini dilakukan agar terdapat data serapan lulusan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk publik.
2. Pendataan lulusan satuan pendidikan yang sudah bekerja dan berwirausaha oleh satuan pendidikan KP, baik melalui grup alumni, media sosial, maupun kontak personal ke lulusan

Indikator Kinerja Utama 2

Presentase peserta didik yang lulus pada satuan pendidikan KP (%)

Output dari proses pembelajaran adalah lulusan yang memiliki kompetensi dan potensi diri mereka sudah berkembang dengan maksimal, sehingga siap untuk menghadapi tantangan baru setelah menyelesaikan pendidikan dengan jenjang tertentu. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang bersifat dinamis, berkembang dan dapat diraih setiap waktu. Kompetensi ini dibuktikan dengan sertifikat yang dimiliki oleh peserta didik satuan pendidikan KP selama menempuh pendidikan 1, 3, atau 4 tahun di satuan pendidikan KP.

IKU ini membandingkan antara peserta didik yang lulus tepat waktu dibandingkan dengan peserta didik yang diterima berdasarkan tahun penerimaan. Peserta didik yang dinyatakan lulus tepat waktu adalah peserta didik yang lulus setelah mengikuti pendidikan selama 8 semester untuk program diploma IV, 6 semester untuk program diploma III, 2 semester untuk program diploma I dan 6 semester untuk SUPM. Peserta didik yang lulus tidak tepat waktu yaitu peserta didik yang lulus dengan masa studi melebihi waktu yang telah ditetapkan. Peserta didik yang diterima berdasarkan tahun penerimaan yaitu peserta didik baru yang diterima pada tahun penerimaan dan ditetapkan melalui surat Keputusan Kepala BPPSDM sebagai peserta didik.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target adalah 85%. Sampai dengan triwulan I, jumlah peserta didik di satuan pendidikan KP adalah 6.322 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4 Jumlah peserta didik di satuan pendidikan KP per Triwulan I Tahun 2026

No	Satuan Pendidikan	Peserta Didik
1	Politeknik AUP	2.588
2	Politeknik KP Sidoarjo	647
3	Politeknik KP Bitung	393
4	Politeknik KP Sorong	277
5	Politeknik KP Karawang	292
6	Politeknik KP Kupang	365
7	Politeknik KP Bone	422
8	Politeknik KP Dumai	252
9	Politeknik KP Pangandaran	240
10	Politeknik KP Jembrana	270
11	AK KP Wakatobi	31
12	SUPM Ladong	93
13	SUPM Pariaman	96
14	SUPM Kotaagung	76

15	SUPM Tegal	130
16	SUPM Waiheru	150
Jumlah Peserta Didik		6.322

Kegiatan yang sudah dilakukan adalah Ujian Sekolah dan Ujian Kompetensi Keahlian yang dilakukan di Bulan Maret 2025 untuk lingkup SUPM, dan proses belajar mengajar dan PKL untuk lingkup Politeknik dan Akademi Komunitas.

Indikator Kinerja Utama 3

Tingkat Optimalisasi Unit Produksi terhadap Penerimaan Fungsional PNB (PNBP) (%)

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari **pajak** dan penerimaan bukan pajak yang disebut **penerimaan negara bukan pajak (PNBP)**.

Menurut UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNB adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNB meliputi:

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Nilai Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada KKP dan terdiri dari PNB Sumber Daya Alam (SDA), PNB Lainnya (Non SDA), dan PNB BLU. Penerimaan fungsional PNB adalah pungutan negara yang berasal dari jasa atau layanan langsung yang diberikan satuan pendidikan KP terkait tugas pokok dan fungsinya (pendidikan), seperti : 1) hasil pendapatan penjualan hasil pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Budidaya, 2) pendapatan penjualan hasil produksi non litbang lainnya, 3) penggunaan sarpras sesuai tusi, dan 4) pendapatan layanan. Pendapatan fungsional ini dibandingkan

dengan target penerimaan fungsional di seluruh satuan pendidikan KP, kecuali di Politeknik KP Sidoarjo, karena merupakan unit kerja BLU.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target tahunan sebesar 50%, dan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah Rp.1.234.561.355.

Indikator Kinerja Utama 4

Efektivitas Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Kelautan dan Perikanan (%)

Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/organisasi lainnya yang memiliki kesamaan profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/ UPT lingkup. Kerja sama lingkup Pusat Pendidikan KP adalah penyelenggaraan kerja sama antara Pusat Pendidikan KP atau Satuan Pendidikan KP dengan pihak mitra pada tahun berjalan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi:

1. Penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK;
2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan;
3. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian;
4. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang;
5. Diseminasi dan publikasi;
6. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama;
7. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi.

Efektivitas kerja sama adalah tingkat kesesuaian pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan dalam mendukung tercapainya kinerja dan program organisasi dengan dokumen kerja sama yang bersifat lanjutan maupun Kerjasama yang baru disepakati. Kerjasama efektif adalah kerja sama yang aktif atau masih memiliki kegiatan pada tahun berjalan dibandingkan dengan seluruh kerja sama yang masih berlaku pada tahun berjalan baik kerjasama lanjutan maupun kerjasama yang baru disepakati di tahun berjalan.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target tahunan sebesar 60%. Sampai dengan triwulan I, masih dalam proses pendataan kerjasama yang berlaku dan kegiatan aktif yang mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Indikator Kinerja Utama 5

Persentase Standar Kompetensi Lulusan di Satuan Pendidikan KP (%)

IK ini adalah indikator yang menunjukkan jumlah peserta didik tingkat akhir yang telah disertifikasi kompetensinya dalam rangka persiapan bekerja di bidang kelautan dan perikanan, dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang diusulkan mengikuti ujian sertifikasi kompetensi pada tahun berjalan.

Periode pengukuran IK ini adalah tahunan, dengan target sebesar 100%. IK ini diturunkan ke seluruh satuan pendidikan KP. Sampai dengan triwulan I, kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung IK ini adalah pelaksanaan ujian keterampilan keahlian (UKK) lingkup satuan pendidikan menengah KP / SUPM KP, dan pelaksanaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan tinggi KP. Jumlah calon lulusan tahun 2026 ini adalah 1.873 orang untuk satuan pendidikan tinggi.

Indikator Kinerja Utama 6

Persentase pendidik yang memenuhi beban kerja pendidik (%)

Pendidik adalah guru dan dosen pegawai profesional dari PNS/ASN KKP yang diberi tugas untuk melaksanakan pembelajaran di Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Beban Kerja Guru (BKG) mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. BKG dipenuhi paling sedikit 24 Jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 Jam Tatap Muka per minggu. Beban Kerja Dosen (BKD) mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. BKD dipenuhi paling sedikit 12 SKS dan paling banyak 16 SKS per Semester. Dosen dengan Tugas Tambahan (DT), melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit 3 SKS dan paling banyak 16 SKS.

IKU ini mengukur jumlah pendidik yang sudah beban kerja dibandingkan dengan jumlah pendidik total di satuan pendidikan lingkup KKP. Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target tahunan sebesar 80%. Sampai dengan triwulan I 2026, kegiatan yang sudah dilakukan adalah melakukan Evaluasi Beban Kerja Guru (BKG) yang dilaksanakan pada Februari – Maret 2026.

Indikator Kinerja Utama 7

Persentase Program Studi dan Perguruan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi (%)

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan insitusi satuan pendidikan. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi. Akreditasi satuan pendidikan adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan institusi satuan pendidikan.

Akreditasi pada Pendidikan KP merupakan dampak mutu pendidikan KP yang terstandard, sehingga nilai mutu lembaga pendidikan dapat menjadi cerminan budaya mutu pada satuan pendidikan KP terselenggara dengan baik. Tahapan proses Akreditasi meliputi:

- a. evaluasi data dan informasi terkait mutu penyelenggaraan satuan pendidikan atau Program Studi;
- b. penetapan peringkat Akreditasi berdasarkan hasil evaluasi; dan
- c. pemantauan pemenuhan syarat peringkat Akreditasi.

IKU ini mengukur mengukur persentase jumlah program studi dan perguruan tinggi pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi, dibandingkan dengan seluruh program studi di satuan pendidikan tinggi KKP. Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target tahunan sebesar 80%. Sampai dengan triwulan I 2026, kegiatan yang sudah dilakukan adalah persiapan pelaksanaan Bulan Mutu Tahun 2026 yang rencana akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026.

Indikator Kinerja Utama 8

Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran seperti perabot, peralatan, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan. Prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Satuan Pendidikan yang meliputi lahan, gedung/bangunan, dan ruang/tempat lain yang diperlukan, dalam bentuk pembangunan dan/atau renovasi gedung, bangunan dan JIJ. Kapasitas adalah daya tampung, kemampuan, atau keluaran sesuatu dari suatu objek, tempat atau sistem dalam periode tertentu.

IKU ini membandingkan antara jumlah sarana prasarana yang diusulkan oleh satuan Pendidikan KP untuk ditingkatkan kapasitasnya dalam tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi jumlah sarana prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam tahun berjalan. Anggaran pelaksanaan bisa bersumber dari RM/SBSN/BLU/MP PNPB. Sarana dan prasarana yang diusulkan dalam bentuk belanja modal (belanja 53). Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target tahunan adalah 80%. Sampai dengan triwulan I 2026, kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah pendataan belanja modal yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan KP dalam rangka peningkatan kapasitas di satuan pendidikan KP

Indikator Kinerja Utama 9

Teknologi yang Diterapkan (Teknologi)

Teknologi terapan adalah hasil pengembangan ilmu yang diwujudkan menjadi teknik, alat, atau bahan yang siap diaplikasikan di berbagai bidang perikanan, seperti penangkapan, permesinan, pengolahan, budidaya dll, dengan penyesuaian terhadap kondisi lokal (lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi). Kegiatan ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung. Dalam konteks kelautan dan perikanan, kegiatan pengabdian berfokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan sektor kelautan serta perikanan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mendiseminasikan dan mengajarkan teknologi, metode, atau praktik yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan dalam kegiatan perikanan dan pengelolaan sumber daya laut.

Periode pengukuran IKU ini adalah tahunan, dengan target tahunan adalah 11 teknologi. Sampai dengan triwulan I 2026, kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah persiapan dan pembahasan teknologi yang akan diterapkan di lokasi pengabdian.

Sasaran Kegiatan 2

Aparatur KKP yang dididik dan dilatih

Indikator Kinerja Utama 10

Persentase Usulan Tugas Belajar yang Direkomendasikan (%)

Salah satu upaya dalam peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan profesionalisme ASN di KKP dilakukan melalui pendidikan formal dengan pemberian

tugas belajar bagi aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk jenjang Pendidikan S1, S2, dan S3. Diharapkan, pemberian tugas belajar dapat meningkatkan kemampuan aparatur KKP dalam menganalisis, menyajikan hasil pelaksanaan tugas dengan baik, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perumusan kebijakan kementerian lebih lanjut.

Salah satu dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan Pegawai Tugas Belajar adalah pemberian rekomendasi oleh Kepala BPPSDM KP. IK ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi tugas belajar bagi Aparatur KKP yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dibiayai ataupun mandiri, termasuk usulan baru maupun perpanjangan. Pemberian rekomendasi tugas belajar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

IKU ini membandingkan antara jumlah usulan tugas belajar yang direkomendasikan dengan jumlah usulan tugas belajar pada tahun berjalan. Periode pengukuran IKU ini adalah semesteran, dengan target tahunan sebesar 70%. Sampai dengan triwulan I 2026, kegiatan yang sudah dilakukan adalah sudah melakukan pembayaran untuk biaya pendidikan, biaya hidup Januari - Juni, biaya jurnal, dan biaya penelitian untuk 96 orang.

Sasaran Kegiatan 3

Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 11

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%)

IK ini merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi). Capaian IK diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit LHP-nya pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 (Triwulan I Tahun 2026).

Tabel 3.5 Capaian IK 11 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%)

Sasaran Kegiatan 3 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IK 11 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%)										
Realisasi Triwulan I				2026					Rencana Kegiatan Pusdik 2025 - 2029	
2022	2023	2024	2025	Target Tahunan	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	% Kenaikan Capaian 2025 - 2026	Target 2029	% Capaian terhadap Target 2029
100	75	82	85	86	86	100	116,28	17,65	86	116,28

Per Triwulan I Tahun 2026, dari target IK sebesar 86%, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris BPPSDM KP No B.1126/BPPSDM.1/HP.510/IV/2026 tanggal 14 April 2026 perihal Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2026 Lingkup BPPSDM KP, capaian Pusat Pendidikan KP adalah 100%, dengan persentase capaian sebesar 116,28%. Dari 1 rekomendasi hasil pengawasan Itjen, Pusat Pendidikan sudah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, sehingga capaian adalah 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I 2025 sebesar 85%, maka terjadi kenaikan capaian sebesar 17,65%. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan I tahun 2025, Pusat Pendidikan KP tidak menjadi objek pengawasan oleh Itjen, sehingga dengan metode pengukuran dimana unit kerja yang tidak menjadi objek pengawasan, capaiannya disamakan dengan target, maka capaiannya adalah 85%. Capaian dari Tahun 2022 - 2024 pun bervariasi, dimana capaian pada Tahun 2021 adalah 100,00%, Tahun 2023 adalah 75%, dan Tahun 2024 adalah 82%. Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Kegiatan Pusdik Tahun 2025 - 2029, maka persentase capaian adalah 116,28%, dimana target tahun 2029 adalah 86%.

Faktor keberhasilan tercapainya IK ini penunjukan PIC untuk rekomendasi yang diterbitkan dan koordinasi yang baik antar tim kerja untuk pemenuhan bukti dukung sebagai bagian dari tindak lanjut temuan. Kegiatan yang mendukung pencapaian IK ini adalah pemutakhiran status tindak lanjut dan monitoring temuan secara berkala. Kegiatan yang mendukung tercapainya IK adalah rapat dengan Biro Keuangan terkait tindak lanjut temuan, kemudian koordinasi dengan Tim Sekretariat BPPSDM KP dan Tim Itjen KP, dan mengirimkan surat dari Kapusdik KP kepada pimpinan unit kerja pendidikan KP dan Katimja lingkup Pusdik untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja di level unit kerja internal BPPSDM KP, maka tabel berikut menggambarkan capaian kinerja di Pusat lingkup BPPSDM KP :

Tabel 3.6. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja pada Level Unit Kerja Lingkup BPPSDM KP

No	Unit Kerja	Target	Capaian	Persentase Capaian (%)
1	Pusat Pendidikan KP	86%	100%	116,28%
2	Pusat Pelatihan KP	86%	86%	100,00%
3	Pusat Penyuluhan KP	86%	100%	116,28%
4	Pusat SS SDM KP	86%	86%	100,00%

Apabila dilihat pada tabel di atas, capaian seluruh Pusat di lingkup BPPSDM KP sudah mencapai target dengan persentase capaian Pusat Pendidikan KP dan Pusat Penyuluhan KP adalah 116,28%, dan Pusat Pelatihan KP dan Pusat SS SDM KP adalah 100%.

Indikator Kinerja 12

Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (*input*) atau kegiatan (*output*) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau *outcome*. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, BPPSDM KP selaku pembina dari Pusat/Balai lingkup BPPSDM KP akan melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Pusat Pendidikan KP.

Penilaian SAKIP di lingkup KKP menggunakan peraturan baru dengan terbitnya Permen PAN RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar dalam penilaian SAKIP yaitu adanya penggabungan dan pembobotan dalam komponen penilaian, keselarasan cascading untuk melihat keselarasan kinerja organisasi, sistem *reward and punishment*, penambahan kriteria penilaian dari 5 menjadi 8 kriteria, serta orientasi penilaian lebih kearah dampak implementasi SAKIP atau *outcome*.

Periode pengukuran IK ini adalah tahunan, dengan target nilai sebesar 82. Sampai dengan Triwulan I 2026, kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung pencapaian IK ini antara lain dengan penyusunan dokumen perencanaan yang selaras antara PK,

Manual IKU, Rincian Target IKU, dan Rencana Aksi, serta melakukan reuiu LKj 2025 yang sesuai dengan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014.

Indikator Kinerja 13

Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (indeks)

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023

Tujuan dari indikator kinerja ini adalah untuk mengukur profesionalitas ASN lingkup Pusat Pendidikan KP berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Perhitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan dengan cara menghitung indeks berdasarkan bobot 4 (empat) komponen yang telah ditetapkan meliputi: (1) Kualifikasi (Bobot 25%); (2) Kompetensi (Bobot 40%); Kinerja (Bobot 30%) dan (4) Disiplin (Bobot 5%).

Periode pengukuran IK ini adalah semesteran, dengan target tahunan adalah 87. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung IK ini adalah:

1. Penyelesaian SKP 2025 dan 2026;
2. Pegawai mengikuti peningkatan kompetensi melalui webinar untuk mendapatkan sertifikat.

Indikator Kinerja 14

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Pendidikan KP (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip

dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit kearsipan level II. Cara pengukuran pada indikator kinerja ini didapatkan dari aspek/formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian (1) Pengelolaan arsip bobot 50% terdiri dari penciptaan arsip (25%), penggunaan arsip (25%), pemeliharaan arsip (25%), dan penyusunan arsip (25%), (2) Sumber daya kearsipan bobot 50% terdiri dari sumber daya manusia (50%), sarana dan prasarana (50%)

Periode pengukuran IK ini adalah tahunan, dengan target tahunan adalah 71. Sampai dengan triwulan I, kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah monitoring arsip di Pusat Pendidikan KP.

Indikator Kinerja 15

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Tabel 3.7 Capaian IK 15 : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)

Sasaran Kegiatan 3 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IK 15 : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)										
Realisasi Triwulan I				2026					Rencana Kegiatan Pusdik 2025 - 2029	
2022	2023	2024	2025	Target Tahunan	Target TW I	Capaian TW I	% Capaian	% Kenaikan Capaian 2025 – 2026	Target 2029	% Capaian terhadap Target 2029
-	-	-	100	77	77	100,00	120,00	0	77	120,00

Per Triwulan I Tahun 2026, dari target IK sebesar 77%, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris BPPSDM KP Nomor 1428/BPPSDM.1/PL.410/IV/2026 tanggal 13 April 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP Triwulan I TA. 2026, capaian Pusat Pendidikan KP adalah 100%, dengan persentase capaian adalah 120,00%. Ketercapaian IK ini tidak lepas dari kedisiplinan pengelola satker dan operator SIRUP dalam melakukan pembaruan data pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) secara berkala. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun 2025, maka tidak terjadi kenaikan atau penurunan, karena capaian di tahun 2025 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Kegiatan Pusdik 2025 – 2029, maka persentase capaian adalah 100%, karena target adalah 77%.

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah adanya monitoring data pengadaan setiap saat oleh Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa SEKJEN KKP serta bagian PBJ BPPSDM KP.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja di level unit kerja internal BPPSDM KP, maka tabel berikut menggambarkan capaian kinerja di Pusat lingkup BPPSDM KP :

Tabel 3.8. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja pada Level Unit Kerja Lingkup BPPSDM KP

No	Unit Kerja	Target (%)	Capaian (%)	Persentase Capaian (%)
1	Pusat Pendidikan KP	77	100	120,00
2	Pusat Pelatihan KP	77	100	120,00
3	Pusat Penyuluhan KP	77	100	120,00
4	Pusat SS SDM KP	77	100	

Apabila dilihat pada tabel di atas, capaian seluruh Pusat di lingkup BPPSDM KP sudah melampaui target dengan persentase capaian seluruh Pusat adalah 120,00%.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Pusat Pendidikan KP Tahun 2026 sebesar Rp.24.069.407.000, dengan penyerapan anggaran Triwulan I Tahun 2026 adalah Rp.8.493.039.489, atau sebesar 35,29%, dan sisa sebesar Rp.15.576.367.511 atau 64,71%.

Tabel 3.9 Tabel Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Pusat Pendidikan KP

No	JENIS BELANJA	PAGU	TRIWULAN I 2026			
			Realisasi	%	Sisa	%
1	Belanja Pegawai	9.564.956.000	2.352.340.088	24,59	7.212.615.912	75,41
2	Belanja Barang	14.504.451.000	6.140.699.401	42,34	8.363.751.599	57,66
	a.Barang Operasional	1.324.287.000	265.416.413	20,04	1.058.870.587	79,96
	a.Barang Non Operasional	13.180.164.000	5.875.282.988	44,58	7.304.881.012	55,42
TOTAL		24.069.407.000	8.493.039.489	35,29	15.576.367.511	64,71

Sementara jika dilihat dari anggaran berdasarkan pagu di Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan KP, dimana kinerja Pusat Pendidikan KP merupakan gabungan dari kinerja seluruh satuan pendidikan KP, maka pagu dan realisasi juga merupakan gabungan dari seluruh satuan pendidikan KP. Tabel berikut menggambarkan realisasi per Sasaran Kegiatan bidang pendidikan KP berdasarkan PK

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan per 31 Maret 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	172.821.807.000	18.471.545.990	10,69
2	Aparatur KKP yang Dididik dan Dilatih	9.000.000.000	3.629.535.593	40,33
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	267.203.269.000	58.513.264.392	21,90
TOTAL		449.025.076.000	80.614.345.975	17,95

Secara umum kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal.

D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Pusat Pendidikan KP

Organisasi Sektor Publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk Pusat Pendidikan KP. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Sampai dengan triwulan I, masih dalam proses pelaksanaan kegiatan sehingga belum dapat dihitung efisiensi anggaran dan alokasi sumber daya di Pusat Pendidikan KP.

BAB IV

- ◆ Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
- ◆ Permasalahan dan Rekomendasi

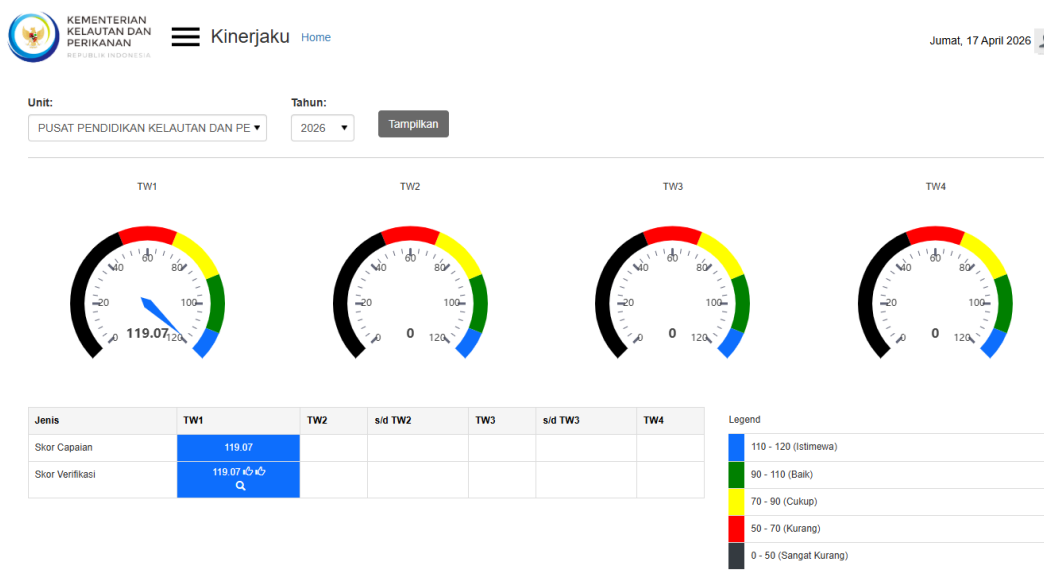
BAB IV

PENUTUP

A. Capaian Kinerja Indikator Kegiatan

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*, disingkat KPI). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja **Pusdik KP Triwulan I Tahun 2026 sebesar 119.07%**

Gambar 4.1. Hasil capaian Kinerja Pusat Pendidikan KP Triwulan I Tahun 2026 pada tampilan web :



sumber : kinerjaku.kkp.go.id

Periode Triwulan I Tahun 2026, terdapat 3 indikator kinerja yang sudah terealisasi, antara lain :

1. IK Persentase Lulusan Pendidikan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%), dengan target tahunan adalah 86%, target triwulan I adalah 5%, dan capaian sebesar 7,23%, dengan persentase capaian adalah 120%;
2. IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 86%, target triwulan

I adalah 86%, dan capaian sebesar 100%, dengan persentase capaian adalah 116,28%;

3. IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%), dengan target tahunan adalah 77%, target triwulan I adalah 77%, dan capaian sebesar 100%, dengan persentase capaian adalah 120%;

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum, kinerja Pusat Pendidikan KP pada triwulan I baik, namun hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan kinerja adalah Indikator Kinerja yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan, agar target akhir tahun dapat dicapai dengan baik.

LAMPIRAN

Link Bukti Dukung : https://bit.ly/KinerjaPusdik_TWI_2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Alan Frendy Koropitan**

Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu
Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Alan Frendy Koropitan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	1	Persentase Lulusan Pendidikan KP Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	86
		2	Presentase peserta didik yang lulus pada satuan pendidikan KP (%)	85
		3	Tingkat Optimalisasi Unit Produksi terhadap Penerimaan Fungsional PNPB (%)	50
		4	Efektivitas Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Kelautan dan Perikanan (%)	60
		5	Persentase Standar Kompetensi Lulusan di Satuan Pendidikan KP (%)	90
		6	Persentase pendidik yang memenuhi beban kerja pendidik (%)	80
		7	Persentase Program Studi dan Perguruan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi (%)	80
		8	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	80
		9	Teknologi yang diterapkan (teknologi)	11
2	Aparatur KKP yang dididik dan dilatih	10	Persentase usulan tugas belajar yang direkomendasikan (%)	70
3	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	11	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Pendidikan (%)	86
		12	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pendidikan KP (Nilai)	82
		13	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pendidikan KP (Indeks)	87
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Pendidikan KP (Nilai)	71
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Pendidikan KP (%)	77

Data Anggaran

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	172.821.807.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	267.203.269.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	9.000.000.000
Total Anggaran Pendidikan KP Tahun 2026		449.025.076.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu
Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Alan Frendy Koropitan